

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menganut sistem politik demokrasi. Sistem demokrasi tersebut menerapkan kebebasan berpartisipasi politik seluas – luasnya kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat ikut serta berperan aktif dalam menentukan kehidupan Bangsa dan Negara. Menurut Sorensen (2008:1) demokrasi adalah bentuk pemerintahan berasal dari rakyat yang mana rakyat memiliki andil penuh terhadap Negara. Indonesia sendiri telah banyak memahami varian – varian demokrasi yang ada di dunia. Beberapa diantaranya yang telah dicoba yaitu: demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila.

Persaingan politik (*political competition*) antar kelompok dan ideologi politik ialah hal yang sangat wajar didalam kehidupan bangsa dan negara. Persaingan setiap kelompok atau kekuatan politik dapat menarik simpati dan dukungan sebanyak – banyaknya agar salah satu kelompok dapat unggul dan merendahkan kelompok lainnya. Hanya adanya dukungan atau perolehan suara yang besar dalam pemilihan umum (pemilu) kelompok atau partai politik dapat memiliki kuasa atas Negara. Saat partai politik dapat menguasai negara maka mereka akan menerapkan pandangan atau ideologi politik kepada masyarakat.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2017 lalu telah diikuti 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Tetapi dari banyaknya

daerah yang akan mengikuti pelaksanaan Pilkada, perhatian publik banyak tertuju pada DKI Jakarta. selain daerah Jakarta, ada juga daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu, Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi dengan cara pemilihan umum secara langsung yang diikuti semua masyarakat Indonesia. Pada saat itu tercatat kurang lebih ada 226 daerah, meliputi 11 provinsi dan 215 Kabupaten dan Kota (detiknews.com, 11 Agustus 2016).

DKI Jakarta Jumlah penduduk berdasarkan informasi pada Pilkada 2017 adalah 10 177 924 juta jiwa (BPS.go.id). Angka yang terbilang besar untuk DKI Jakarta, karena Jakarta hanya memiliki wilayah yang sangat terbatas. Jakarta adalah pemukiman sangat padat penduduknya. Banyaknya kelompok sosial tertentu yang memiliki kepentingan terhadap Kota Jakarta dan ingin mendapatkan kesejahteraan. Berbagai kelompok sosial tersebut mengatas namakan suku dan agama tertentu agar dapat meraih eksistensi strategisnya di ibu kota. Dengan demikian DKI Jakarta menginginkan adanya pemimpin yang mampu mengakomodir dari berbagai macam kepentingan kelompok.

DKI Jakarta sendiri pertama kali menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2007. Pilkada yang diselenggarakan di DKI Jakarta mendapatkan banyak perhatian, baik ditingkat Nasional ataupun Internasional. Tahun 2012 DKI Jakarta kembali melaksanakan Pilkada secara langsung untuk kedua kalinya. Ada

enam pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada 2012 yaitu, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli, Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Hidayat Nur Wahid - Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem Triani Benjamin dan Alex Noerdin - Nono Sampono. Pada saat itu yang memenangkan Pilkada adalah pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada Pilkada tahun 2017 yang diikuti oleh pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno (detik news.com, 11 Agustus 2016).

Persaingan yang sangat ketat terlihat dari perolehan suara berdasarkan rekapitulasi real count dokumen C1 oleh KPU DKI Jakarta, pasangan Agus – Sylvi memperoleh 936.609 suara atau 17,06%. Selanjutnya pasangan Basuki (Ahok) – Djarot memperoleh suara sebesar 2.357.587 suara atau 42,96%. Pasangan Anies – Sandi memperoleh suara 2.200.636 atau 39,97% . Dapat dilihat dari perolehan suara dia atas yang memiliki suara terbanyak adalah pasangan Ahok – Djarot yaitu 42,96 % , diikuti pasangan calon Anies – Sandi yaitu 39, 96%, dan pasangan Agus – Sylvi yaitu 17,06% (kpuJakarta.go.id).

Saat masuk pada putaran kedua Pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkenal isu SARA. Isu SARA itu sendiri muncul dalam Pilgub DKI Jakarta karena bermula dari kasus dugaan penistaan agama, surat Al – Maidah ayat 51. Peristiwa dugaan SARA atau penistaan agama ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada

Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato dihadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik (Tirto.id 16 November 2016).

Dalam Putaran Kedua Pilkada 2017, perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan Anies-Sandi yang unggul dengan perolehan suara sebesar 57,95%. Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Sementara itu, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan prolehan suara sebesar 42,05%. Pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem (kpuJakarta.go.id).

Dapat dilihat dari hasil putaran kedua pasangan Ahok -Djarot mengalami penurunan perolehan suara yang sangat merosot dan dimana perolehan suara Pilkada dimenangkan oleh pasangan Anie-Sandi. Merosotnya perolehan suara Ahok-djarot dikarenakan Ahok terkenal kasus SARA pada putaran kedua Pilkada. Dimana pernyataan Ahok berbunyi *“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu,”* (BBC.com 17 November 2017). Kasus SARA itu sendiri menjadi Viral di media sosial setelah Buni Yani mengunggah video rekaman pidato Ahok di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun

dengan memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51'. Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melaporkan Ahok kepada polisi (BBC.com. 17 November 2016).

Dengan adanya kasus tersebut maka MUI dan FPI sendiri mengeluarkan fatwanya untuk menanggapi kasus Ahok yang mana iya dikatakan telah menistakan Agama dan telah menistakan para Ulama. Menurut ketua umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar menyatakan, bahwa "Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Qur'an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," (mui.or.id). Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ini pun jelas mengatakan bahwa Ahok telah menistakan agama dan para Ulama, dan yang mana Ahok juga telah melukai banyak hati umat Muslim dengan perkataannya. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menggunakan surat Al – Maidah didalamnya karena ia teringat kepada seorang ibu, yang mana ibu itu bilang kepadanya bahwa ia tidak bisa memilih dirinya karena takut dikatakan murtad (Detiknews.com, 04 April 2017).

Pada tahun 2014 MUI terlebih dahulu telah mengeluarkan fatwanya mengenai seorang pemimpin, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Syamsuddin menyatakan umat Islam wajib memilih pemimpin yang sholih. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kembali bahwa seorang Muslim harus memilih pemimpin Muslim. Dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran, umat Islam tegas

dilarang memilih pemimpin yang mengejek agama dan wajib memilih pemimpin yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk pada aturan Allah SWT. Penegasan ini merupakan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 55 dan 57 (Republika.co.id, 21 Maret 2014).

Lalu Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab juga menyatakan “ dalam keadaan apapun, umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non – Muslim, kecuali darurat ”. misalnya saja seseorang (Muslim) tinggal di negara non- Muslim seperti Amerika, dia harus memilih pemimpin non – Muslim yang bisa memberikan kebaikan untuk umat Muslim. Kalau di Indonesia bukan konteks yang darurat. Di Indonesia tidak berlaku seperti itu, karena mayoritas masyarakatnya merupakan pemeluk agama Islam (Kompas.com, 28 Februari 2017).

Fatwa – fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI terkait kasus penistaan agama oleh Ahok dan Fatwa mengenai seorang pemimpin harus seorang yang beragama Islam ini menuai konflik panas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa adanya konflik SARA yang meliputi agama dan etnis. Dengan adanya isu SARA seperti itu ditakutkan masyarakat akan terpecah belah dan akan saling membenci satu sama lain. Menurut Susanto dari *penelitian Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia* (PSIK Indonesia) menyatakan bahwa sampai saat ini Pilkada 2017 masih dipenuhi oleh isu – isu politik primordial berbasis suku, agama, ras, dan etnis. Ia menambahkan “ tidak masalah jika membangkitkan dukungan emosional melalui Primordialisme. Akan tetapi tidak dibenarkan jika itu untuk membenci pihak yang berbeda

(Kompas.com 03 Januari 2017). Banyaknya kontroversi mengenai pemimpin non- Muslim di tengah – tengah penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim.

Sama halnya Menurut Sudjatmiko, politikus PDI Perjuangan mengatakan ada oknum yang sengaja membuat isu SARA agar mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak agar oknum tersebut mendapatkan kekuasaan (Tribunnews.com 14 Januari 2018). Di media – media sosial, isu mengenai pemimpin non – Muslim menjadi pembahasan dari Kubu anti Ahok. Isu ini digunakan agar mengingatkan para pemilih terutama yang berasal dari kalangan umat Islam untuk mengutamakan memilih pemimpin seagama. Dalam persaingan Pilkada DKI Jakarta 2017, status Ahok yang seorang Kristiani dengan etnis Tionghoa kembali menjadi pembicaraan.

Di media sosial sendiri, isu soal pemimpin non - Muslim kembali menjadi pembahasan. Isu Sara akan tetap digunakan dalam menyerang siapapun calon pemimpin dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut Ray, Pengamat politik dari lingkaran Madani mengatakan politik uang tidak terlalu bahaya dari pada isu SARA dalam pemilu. Karena isu SARA mengakibatkan efek jangka panjang yang akan terus menimbulkan perbedaan (Detiknews.com 26 Desember 2017).

Walau isu Sara itu akan terus ada saat pemilihan Gubernur, Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti menyebutkan “ walaupun isu Sara itu terus ada, sepertinya masyarakat akan melihat sikap pemimpin, bukan dari agama atau rasnya, yang akan dilihat nanti adalah

sosok pemimpin yang dapat memimpin warga Jakarta secara keras tetapi santun”. (Merdeka.com.14 Maret 2016). Menurut wakil Kahtib Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, KH. Taufiq Damas “ Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu adalah contoh penggunaan isu SARA dalam Pilkada yang paling buruk dan paling berutil selama demokrasi paska reformasi” (Tribunnews.com 15 Oktober 2018).

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi momen menarik karena banyak diwarnaidengan kontroversi mengenai SARA dan praktek politik berbau suku, ras, dan agama. Jakarta bukan hanya Ibu kota, tetapi sudah menjadi pusat pemerintahan dimana setiap aktivitas yang ada dapat menjadi cerminan masyarakat. Menariknya juga pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memunculkan pembelahan ideologi pada politik dan ada salah satu calon Gubernur menjadi sasaran demo Jutaan orang setelah dituduh menistakan agama. Adapun intimidasi kepada warga Muslim agar tidak memilih pemimpin non-Muslim. Warga Indonesia tidak hanya berasal dari agama Islam melainkan adapun yang memiliki keyakinan yang lain. Dengan adanya SARA masyarakat non- Muslim jadi takut untuk mencalonkan diri penjadi pemimpin. Dengan adanya SARA dalam pemilihan gubernur peneliti ingin mengetahui mengenai Kebangkitan Ideologi Politik Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017; motif dan Implikasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adanya masalah dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah Pilkada terheboh yang pernah terjadi dan menimbulkan banyak perdebatan dan perselisihan di masyarakat. Maka dari itu peneliti akan merumuskan masalah yaitu:

1. Apa saja motif yang melatar belakangi terjadinya pembelahan ideologi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017?
2. Apa implikasi sosial dari pembelahan ideologi politik dalam kehidupan masyarakat DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui apa saja motif yang melatar belakangi pembelahan ideologi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Implikasi sosialnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik. kajian ilmu politik ini berkaitan dengan pembelahan ideologi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis ini mampu menambah ilmu mengenai motif yang melatar belakangi adanya pembelahan ideologi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan apa implikasi sosialnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berguna untuk menunjang kevalidan dan kelengkapan sebuah tulisan Dimana dalam tinjauan pustaka sendiri menjelaskan penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian yang sedang di teliti. Beberapa kajian di bawah ini diambil dari Skripsi dan Jurnal terdahulu yang didalamnya terkait teori dan pembahasan yang hampir mirip dengan apa yang akan di bahas.

Tinjauan pustaka yang pertama jurnal dari Sholikin (2018) yaitu membahas mengenai aksi Bela Islam yang menjelang akhir 2016 yang saat itu berhasil melobi banyak musim di Jakarta. Banyak timbul kecurigaan dari berbagai kelompok yang terkait dengan aksi tersebut, masing – masing dari mereka memiliki argumen dan kepentingan yang berbeda. Penelitian ini tidak dapat memberikan kesimpulan banyak mengenai aksi tetapi akan memberikan catatan akhir dari aksi pertahanan Islam tersebut. Pertama gerakan sosial Islam yang dikemas melalui aksi pembela Islam adalah kondisi pembentukan demokrasi. Hanya memperkuat warga untuk dapat menyeimbangkan kebijakan. Kedua adanya revolusi teknologi informasi masyarakat lebih mudah belajar dan ,mencari informasi yang

berkaitan dengan isu – isu agama. Ketiga membangun solidaritas, mengembangkan kapasitas dan kesadaran masyarakat.

Kedua jurnal dari Herdiansyah, Junaidi & Ismiati (2017) yaitu membahas mengenai isu politik dan agama pada tahun 2016- 2017 yang menjadi krusial akibat kulminasi dari pergulatan ideologi politik yang memanfaatkan pembelahan sosial berdasarkan ideologi. Peralihan kekuasaan pasca pemilu 2014 yang menetapkan kalangan nasionalis ada dipuncak kekuasaan membangkitkan kembali sentimen politik berdasarkan isu – isu agama. Menimbulkan kekhawatiran bangkitnya komunisme, Indonesia merupakan indikasi kuat tentang pergolakan politik. Meskipun politik aliran telah dianggap tidak relevan akibat menguatkan unsur kepentingan dalam pemilu, tetapi peristiwa politik pasca 2014 menjadi indikasi bahwa politik aliran, dalam batas tertentu masih berlaku di Indonesia.

Ketiga jurnal dari Juditha (2017) yaitu, hatespeech di media pada Pilkada DKI Jakarta. Marjinalisasi dan prasangka yang mengarah pada ujaran kebencian tidak ditemukan dalam berita-berita di media Online. Namun tema komentar yang paling dominan mengarah pada kebencian terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Meski demikian komentar yang pro Ahok di ruang komentar jauh lebih tinggi. Komentar netizen juga banyak berisikan ujaran kebencian terhadap masing-masing pasangan calon dengan kata-kata yang tidak pantas, menghina, dan melecehkan.

Keempat jurnal dari Mayasari (2017) yaitu Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik. konstruksi media pada pemberitaan Aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Thahaja Purnama di dua (2) surat kabar nasional, yaitu Kompas dan Republika. Kompas pada kategori isu ‘Aksi Damai Menuntut Penegakan Hukum Terhadap Ahok atau SARA?’ tidak menyebutkan secara tegas apakah aksi tersebut adalah penuntutan hukum atau aksi SARA. Republika pada kategori isu ‘Aksi Damai Menuntut Penegakan Hukum Terhadap Ahok atau SARA?’ menyebutkan secara tegas bahwa aksi tersebut adalah aksi penuntutan hukum terhadap Ahok bukan aksi SARA.

Kelima jurnal dari Permadi (2017) yaitu jejaring mobilisasi politik pencalonan Ahok Djarot konteks Pilkada DKI Jakarta 2017. Terdapat dua instrument mobilisasi yang digunakan petahana dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, yaitu instrumen mobilisasi formal (partai politik) dan non-formal yaitu organisasi non-partai politik. Jejaring mobilisasi dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis seberapa kuat dampak jejaring politik dalam proses pencalonan di Pilkada.

Keenam jurnal dari Sutrisno (2017) yaitu partisipasi masyarakat pada Pilkada. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pilkada yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia. Pilkada yang demokratis harus disertai baiknya kondisi partisipasi politik warga negara.

Kenyataannya, partisipasi politik dalam Pilkada masih banyak terkontaminasi oleh persoalan mendasar yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya.

Ketujuh jurnal dari Sari (2016) yaitu kebangkitan politik identitas pada Pilgub DKI Jakarta. kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai Muslim yang terhina sehingga sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. Kondisi ini dihadirkan untuk membangun psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus ruang untuk membangun batas kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang minoritas demi mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama.

Kedelapan jurnal dari Budiyo (2016) yaitu membahas mengenai peran media sosial dalam komunikasi politik dengan mengambil kasus Pilkada DKI 2017. Dalam demokrasi komunikasi melalui media sosial, komunikator bisa membangun komunikasi politik dengan para pendukungnya, membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan modal sosial bagi pelaku politik yaitu terbukanya jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat.

Kesembilan jurnal dari Kurniasih (2016) yaitu membahas mengenai analisa isi terhadap meme – meme di duniya maya dalam Pilgub DKI Jakarta. Pertama gambar-gambar yang dimunculkan dalam meme berupa tokoh yaitu calon gubernur, tokoh-tokoh di balik partai pengusung

dan artis ; kegiatan, program atau kondisi wilayah DKI Jakarta ; komik dan foto masyarakat. kedua pesan yang disampaikan dalam meme mencakup profil calon gubernur pilihan, perbandingan diantara para calon gubernur, janji-janji atau pernyataan dari para calon gubernur, janji-janji atau pernyataan dari tokoh partai pengusung, pesan untuk berpartisipasi di dalam pemilihan gubernur dan sindiran terhadap para tokoh. Ketiga tujuan netizen menampilkan meme adalah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan gubernur, untuk hiburan, menunjukkan kreativitas, sindiran/satire, kritik sosial, menyampaikan informasi lebih dari sekedar teks dan menunjukan kapasitas para calon serta mengajak netizen memilih calon tertentu

Sepuluh jurnal dari Supriyadi (2015) yaitu mengenai politisasi agama dan komunikasi SARA di ruang publik. bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional (*rational choice*), menentukan pilihan berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (*maximizing benefit*). Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track record kandidat.

Tabel 1.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Jenis pengelompokan	Temuan/Hasil
1	Isu Sara pada Pilkada (media <i>Online</i>)	Budiyono (2016), Supriyadi (2015), Mayasari (2017), Kurniasih (2016), Juditha (2017), Menjelaskan mengenai isu- isu sara yang telah diberitakan oleh Media masa atau media <i>Online</i> dan dapat mempengaruhi masyarakat.
2	Politik Identitas	Sari (2016), Permadi (2017), Menjelaskan politik identitas sering muncul pada pilkada dan menyinggung mengenai faktor etnis dan

		faktor agama.
3	Pembelahan ideologi	Herdiansaah, Junaidi&Ismiati(2017) Memjelaskan pergulatan ideologi politik yang memanfaatkan pembelahan sosial berdasarkan ideologi dan adanya politik aliran.
4	Gerakan politik	Sholihin(2018) Menjelaskan adanya gerakan aksi Bela Islam dapat memperkuat warga untuk menyeimbangkan kebijakan.
5	Pilkada	Sutrisno (2017) Menjelaskan pemilihan kepala darah serentak adalah bentuk pemilihan kepala daerah secara bersamaan.

Sumber: Diolah oleh penulis (2018).

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa masing – masing peneliti membahas tentang isu Sara, politik identitas, pembelahan ideologi dan adanya gerakan sosial untuk memperkuat masyarakat agar lebih bijak dalam memilih pemimpin

Sedangkan penelitian yang saya teliti ada beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti mengenai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi di sini saya ingin memfokuskan ke arah motif pembelahan ideologi dan implikasi di balik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu teori pembelahan Ideologi Politik, teori Motif penyebab konflik, dan teori Implikasi perubahan sosial, menurut beberapa ahli:

1. Pembelahan Ideologi, Ideologi Politik, Macam – Macam Ideologi

a. Pembelahan Ideologi

Beberapa tahun terakhir struktur perpecahan politik semakin maju masyarakat industri Eropa Barat berubah secara substansial menurut Lipset & Rokkan (dalam Helsinki, 2007: 1). Jalur yang berbeda dalam perkembangan politik dan sosial di masyarakat barat selalu menyebabkan variasi dalam sifat dan pentingnya perpecahan ideologis. Menurut literatur terdahulu tentang perpecahan politik, pembelahan ideologi hadir di masyarakat sementara sifat dan kepetingan perpecahan berdasarkan agama berbeda dari negara ke negara tergantung pada komposisi agama dari populasi mereka menurut Lipset & Rokkan (dalam Helsinki, 2007:3). Pola yang dihasilkan oleh interaksi perpecahan bervariasi di beberapa negara, perpecahan berdasarkan agama dan konflik ekonomi terpotong satu samalain dan membentuk pola dua dimensi divisi ideologis. Kitschelt (dalam Helsinki, 2007:3).

Konsep pembelahan, menurut Mair (dalam Al- Hamdi 2017:76) biasanya dapat melibatkan sistem kepercayaan seperti kelas atau agama. Karena itu, Mair mengusulkan tiga fitur dasar pembelahan: pertama, perpecahan terdiri dari divisi sosial yang membedakan antara kelompok orang atas dasar karakteristik sosial struktural seperti status, agama atau etnis. Kedua, melibatkan identitas kolektif dimana perpecahan didasarkan pada identitas dan kepentingan bersama sebagai petani, pekerja, muslim, Katolik, dll. Ketiga, melalui ekspresi organisasi baik melalui partai, serikat pekerja, agama organisasi dan sejenisnya.

Menurut Al – Hamdi (2017: 78), berdasarkan orientasi ideologi, konfigurasi perpecahan politik kontemporer di Indonesia dapat disederhanakan menjadi dua aliran, yaitu: partai nasionalis dan partai berbasis Islam. Berkenaan dengan partai-partai nasionalis, biasanya mendominasi suara elektoral dan kursi parlemen.

Pembelahan ideologi politik dapat disebabkan karena adanya kelas – kelas sosial, status agama dan etnis. Perpecahan ideologi di Indonesia juga terdapat dua aliran yaitu aliran partai nasionalis dan partai berbasis Islam. Perpecahan ideologi politik ini sendiri telah lama adanya.

Menurut Herdiansyah, Junaidi & Ismiati (2017: 64) masyarakat Indonesia memiliki tiga kelompok kategori yaitu kategoris yaitu santri, abangan, dan priyayi. Kelompok santri merupakan golongan yang mempelajari ajaran Islam secara intensif dan mempraktikkan nilai serta tradisi Islam didalam kehidupan sehari-harinya. Kaum santri biasanya berkembang di institusi pendidikan Islam yang bernama pesantren. Kelompok abangan merepresentasikan masyarakat yang meskipun berasal sebagian besarnya dari kalangan Muslim tetapi memilih untuk tidak menonjolkan aspek keagamaan (Islam) dalam kehidupan sosial dan politiknya. Kaum abangan lebih tertarik untuk mengadopsi gagasan-gagasan politik universal yang tidak terkait dengan ajaran agama (Islam). Sementara kelompok priyayi merepresentasikan nilai-nilai golongan aristokrasi Jawa yang pandangan religiusnya masih menjalankan nilai-nilai Hindu. Mereka biasanya menempati posisi struktur pemerintahan dan memegang kekuasaan otoritatif. Konfigurasi perpecahan ideologis dapat

ditemukan di negara-negara yang memiliki jenis liberal rezim kesejahteraan dan dimana agama tidak memainkan peran penting dalam politik.

b. Ideologi Politik

Istilah ideologi ialah kata yang terdiri dari “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari Yunani *eidos*, bahasa latinya menjadi *idea*, yang diartikan sebagai “ide” atau “gagasan”. Sedangkan kata “logi” berasal dari Yunani *logos*, yang artinya “kata” dan “ilmu”. Jadi secara etimologi kata Ideologi dapat diartikan menjadi “pengetahuan tentang ide-ide” Setiardi (1993:17).

Selanjutnya, menurut Freedman (dalam Eatwell & Wright 2003: 21) ideologi merupakan suatu bentuk pemikiran politik yang telah menyediakan akses langsung yang dinilai penting untuk dapat memahami pembentukan dan hakikat teori politik, kekayaan, keanekaragaman, dan seluk – beluknya. Ideologi adalah ide – ide tentang pemikiran politik yang berkaitan langsung oleh hakikat politik, kekayaan, kekuasaan, dan keanekaragaman.

menurut Sargent (dalam Al- Hamdi, 2017:44) ideologi adalah sistem nilai dan keyakinan mengenai berbagai lembaga dan proses masyarakat yang diakui sebagai kebenaran oleh sekelompok orang. Selanjutnya, Ball et al. (dalam Al – Hamdi, 2017:44) berusaha untuk menekankan konsep ideologi sebagai seperangkat ide yang melakukan empat fungsi bagi orang-orang: menjelaskan dan mengevaluasi kondisi

sosial, membantu orang memahami tempat mereka di masyarakat dan menyediakan program untuk tindakan sosial dan politik. mengenai ideologi politik, ia mengaitkan masalah dan sistem politik. Easton menekankan sistem politik sebagai alokasi nilai-nilai otoritatif untuk masyarakat sementara Lasswell mendefinisikan politik sebagai "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana".

Ideologi politik itu sendiri merupakan sebuah keyakinan dan pemikiran normatif dan empiris, yang berpusat kepada permasalahan – permasalahan hakikat manusia. Menurut Hornby (dalam Ismail 1999:15) mengatakan ideologi seperangkat gagasan yang telah membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dapat dipengaruhi oleh seseorang atau kelompok. Ideologi menjadi penting dan sangat vital bagi kelangsungan bangsa, karena ideologi akan memberikan kejelasan mengenai identitas nasional. Jadidalam politik, ideologi menjadi penggerak dinamis yang utama dalam kehidupan organisasi atau lembaga politik, serta juga dalam kehidupan politik suatu negara atau suatu bangsa. Ideologi politik dapat berfungsi menyatukan rakyat dalam organisasi politik untuk mendapatkan tindakan secara efektif.

c. Macam – Macam Ideologi

Keberlangsungan hidup suatu negara biasanya tidak dapat terlepas dari adanya penerapan ideologi didalamnya. Dimana ideologi yang diterapkan oleh suatu negara pasti akan berbeda dengan ideologi yang diterapkan oleh masing – masing negara. Jenis atau macam – macam

ideologi yang ada yaitu; Ideologi Liberalisme, Ideologi Konservatisme, Ideologi Sosialisme, Ideologi Komunisme, ideologi Anarkisme, Ideologi Nasionalisme, ideologi Islamisme, Ideologi fasisme dan Ideologi Feminisme. Sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan ideologi nasionalisme dan ideologi Islamisme.

1. Ideologi Nasionalisme

Nasionalisme sebagai satu ideologi yang mendefinisikan hubungan antara individu dengan negara dan melegitimasi apa yang dilakukan negara atas nama warga negara. Anderson (2008: 8-11) memberikan pandangan tentang nasionalisme, menyatakan bahwa bangsa atau “nation” ialah kelompok politis yang dibayangkan (*imagined*) sebagai suatu yang sifatnya terbatas dan berkedaulatan. Selanjutnya ia memaparkan bahwa bangsa disebut komunitas atau kelompok karena ia selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar mendatar, sekalipun ketidakadilan hampir selalu ada disetiap bangsa. Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Menurut (Sulistiono 2018:5) Nasionalisme berasal dari kata nation (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat

diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat terhindarkan.

Menurut Hutchinson (dalam Sulistiono, 2018:6) Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya modern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan nasionalisme adalah kesadaran yang mendorong diri untuk ikut membentuk kedaulatan dan kesepakatan negara berdasarkan bangsa yang telah disepakati dan telah dijadikan pijakan dan tujuan didalam menjalankan kebudayaan dan ekonomi. Tujuan nasionalisme adalah untuk menciptakan pertahanan kedaulatan negara dengan mewujudkan identitas untuk sekelompok manusia. Nasionalisme tumbuh di tengah – tengah masyarakat yang pola

pikirnya agak merosot. Mulai saat itu manusia hidup bersamaan didalam satu wilayah agar dapat mempertahankan negara dan bangsa.

Menurut Tibi (2016,292) Islamisme adalah pemahaman agama (Islam) dalam bentuk tatanan sebuah negara, yaitu negara Islam. Kelompok Islamisme telah mengidolakan Islam pada zaman Nabi SAW. Di Madinah, dan mereka berupaya untuk mengembalikan praktik berIslam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berIslam pada zaman Nabi SAW. yaitu zaman empat belas abad yang silam. Agenda utama Islamisme adalah mendirikan tatanan negara Islam dan memobilisasi umat Islam dalam rangka membangun tatanan yang totaliter yang disebut sebagai nizam Islami.

Ideologi Islamisme ini menunjukkan adanya dua aliran Islam yang menentang yaitu, sunni dan shiite, yang masih berjuang untuk Islam atau pembentukan syariah. mereka percaya bahwa agenda pembentukan syariah ini akan mendapatkan dukungan Islam dan realisasi penuh dari komunitas Islam yang ideal. bangsa ini diliputi pemikiran dari Ayatollah Khomeini, A'la Al-Maududi dan Sayyid Qutb (Al-Hamdi, 2017:47).

Kelompok Islamisme merupakan kelompok Muslim yang pertama ada di Indonesia, jauh sebelum Pos - Islamisme yang baru muncul sekitar tahun 1970-an. Kelompok Islamisme yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dibanding agama lain yang ada (Kristen atau pun Yahudi), syariatnya pun murni dari Allah, dan bisa menjadi alternatif untuk menolak praktek kuasa yang menurut mereka, tidak Islami di Indonesia. Wujudnya ada didalam Partai Masyumi pada

masa itu yang menginginkan Indonesia Merdeka berdasarkan syariat Islam yang dituangkan dalam sila pertama Pancasila: “ Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya” dan berubah menjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”, ditetapkan sebagai sila yang pertama Pancasila, sejak tahun 1945 sampai sekarang (Mahmudah, 2016,83). Kelompok Islamisme di Indonesia, sejak zaman pemerintahan Soekarno sampai sekarang telah menolak sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan tetap berupaya untuk kembali pada Piagam Jakarta. Alasannya bahwa Piagam Jakarta lebih cocok untuk Indonesia yang nota bene dihuni oleh mayoritas Muslim, yaitu 95 % (Zakaria, 2014:113).

Gerakan Islam yang mulai bangkit pasca lengsernya rezim Orde Baru ditandai oleh dua model gerakan; yaitu struktural dan kultural. Model gerakan pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PKS (Partai Keadilan Sosial), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, dan PP (Partai Persatuan). Model gerakan kedua ditandai dengan munculnya ormas - ormas Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI), dan menyusul gerakan lainnya yang sudah ada sejak zaman Orde Baru, seperti Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).

2. Motif , Manajemen Konflik dan Motif Penyebab Konflik

a. Motif

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian motif. Motif, atau dalam bahasa Inggris “motive” berasal dari kata movere atau motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan “ gerak ”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku Sarlito (2009:137).

Motif adalah dorongan yang telah terjalin oleh tujuan. Motif juga memiliki hubungan antara respons dengan keadaan tertentu. Motif yang ada didalam diri kita sendiri adalah wujud sebuah perilaku yang bertujuan ,mencapai sasaran kepuasan.

Menurut Giddens (dalam Sobur 2003:267) menyatakan motif dapat memberikan energi pada tindakan manusia sepanjang lintas kognitif/ perilaku yang kearah pemuasan kebutuhan. Selanjutnya menurut Koontz dan kawan – kawan (dalam Sobur 2003: 267) menyatakan motif adalah suatu keadaan dari dalam diri yang menggerakkan atau perilaku ke arah tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang untuk dapat mencapai keinginan dan kepuasan yang memiliki satu tujuan. Motif juga alasan Dimana adanya dorongan yang dapat seorang berbuat sesuatu tindakan.

b. Manajemen Konflik

Manajemen konflik menurut Wirawan (2010:129) adalah suatu proses antara dua pihak yang terlibat konflik atau ada pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Menurut Irvine dalam (Wirawan 2010:131) manajemen konflik merupakan strategi yang mempekerjakan organisasi atau individu untuk mengidentifikasi dan mengelola perbedaan, sehingga mengurangi beban dari konflik.

Erikson kemudian menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level. Level pertama konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orangtua atau masyarakat. Level kedua adalah konflik terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya. 17 18 Level ketiga adalah konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi (dalam Lestari, 2012: 101). Konflik akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik. Agar konflik dapat terkelola dengan baik maka diperlukan manajemen konflik. Wirawan (2010: 129) mendefinisikan manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan

Selanjutnya Robbins (dalam Winardi, 2003: 271) menjelaskan manajemen konflik sebagai proses pengkoordinasian dengan menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkatan konflik yang diinginkan sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik

tersebut “stimulating and creating it as well as diminishing or channeling it”.

Sementara itu menurut Moore (dalam Badriyah 2014:18) mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintang, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Selanjutnya Dafidoff (1991: 139) memberikan penjelasan bahwa manajemen konflik adalah kecenderungan pilihan sikap dalam menghadapi, mengenali, mengidentifikasi, dan menempatkan kondisi-kondisi yang dilakukan sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup. Hal senada juga dikemukakan oleh Toomey (dalam Wirawan: 134) 19 mengungkapkan bahwa manajemen konflik adalah pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik

Dari definisi di atas mengenai manajemen konflik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen konflik mengambil langkah untuk situasi yang berpotensi menghasilkan hasil yang tidak baik, menyelesaikan konflik dengan cara positif untuk meminimalisir dampak negatif dan dapat sebagai pengoordinasian yang digunakan individu dalam mengatur pertentangan dalam sikap dan perilaku.

1. Konflik

Konflik ialah gejala sosial yang telah hadir didalam kehidupan sosial, konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam

setiap ruang dan waktu, kapan saja dan Dimana saja. Salah satunya ialah masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. konflik juga merupakan satu pertarungan menang atau kalah antar perseorangan atau kelompok yang memiliki berbeda kepentingan satu sama lain dalam organisasi. Atau dapat dikatakan sebagai, konflik merupakan segala macam interaksi atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Pertentangan kepentingan akan berbeda dilihat dari intensitasnya tergantung sarana apa yang telah dipakai. Dimana masing-masing dari kelompok kepentingan ingin membela nilai-nilai yang telah dianggap benar oleh mereka, dan memaksa pihak-pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras.

“ Konflik berasal dari kata latin “ *Configere* ” yang berarti ”saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya” (Haryanto & Nugroho, 2011:113). Konflik dilatarbelakangi adanya perbedaan – perbedaan yang dibawa oleh individu dalam satu interaksi. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain- lain. Dengan adanya perbedaan – perbedaan individual dalam interaksi sosial, serta konflik merupakan situasi yang sangat wajar terjadi didalam bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat

yang lain, konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri.

Menurut Surbakti (2007:149) istilah konflik dalam ilmu politik sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik juga mengandung arti seperti “ benturan ”, seperti adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik menjadi gejala yang sering hadir didalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara. Jadi konflik politik dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber dari keputusan yang diputuskan ataupun dibuat oleh pemerintah.

Konflik menurut Marx (dalam Ritzer & Gooman 2004:73), hakikatnya sosial adalah konflik. konflik merupakan satu kenyataan sosial yang bisa dapat ditemukan Dimana - mana. Bagi Marx, konflik sosial ialah pertentangan antara masing – masing masyarakat untuk dapat mempertahankan dan memperebutkan aset-aset yang dinilai penting. Jenis dari konflik sosial ini bisa berupa, konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan bisa juga konflik antara bangsa. Menurut Webster, mendefinisikan konflik sebagai berikut yaitu:

1. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan.

2. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain
3. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya pertentangan pendapat kepentingan, atau pertentangan individu).

Dapat ditarik kesimpulan konflik ialah kejadian sosial yang terjadi di setiap masyarakat pada umumnya. Gejala sosial yang akan terus hadir di kehidupan masyarakat sosial.

2. Proses Terjadinya Konflik

menurut Wirawan (2010:123) konflik adalah proses yang berawal dari adanya masalah yang mengakibatkan terjadinya konflik (objek konflik) sampai terjadinya solusi. Di bawah ini akan menjelaskan proses – proses terjadinya konflik yang terdiri dari beberapa fase:

a. Penyebab Konflik

Pada fase ini, proses penyebab konflik terjadi. Sebagai contohnya, adanya perbedaan yang telah terjadi. Adanya tujuan yang sama, akan tetapi ada perbedaan mengenai cara untuk mencapai tujuan itu sendiri.

b. Fase Laten atau Fase Tidak Terlihat

Dalam fase laten, penyebab konflik itu telah ada. Perbedaan pendapat terjadi, adanya perbedaan tujuan dan saling terkait. Akan tetapi, pihak – pihak yang terlibat dalam konflik akan diam saja dan belum mau mengekspresikannya. Masing – masing pihak mungkin belum menyadari telah terjadinya konflik ataupun pihak – pihak tersebut belum menganggap masalah tersebut sebagai konflik.

c. Fase Pemicu

Dalam fase ini, kedua belah pihak telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi itu memicu terjadinya konflik secara terbuka. Pertentangan dalam konflik ini merupakan sikap, perilaku, dan dengan menggunakan kata – kata lisan atau tertulis. Satu hal yang harus dipahami dalam fase ini ialah terjadinya proses *differensiasi* didalam pihak – pihak yang terlibat konflik. Sebelum terjadinya konflik, masing – masing pihak tidak memiliki perbedaan mengenai objek penelitian konflik. Setelah masing – masing pihak menyadari terjadinya konflik maka masing – masing pihak menyusun strategi dan taktik untuk melakukan interaksi konflik.

Jika fase pemicu konflik tidak selesai, maka konflik akan menjadi besar. Perbedaan pendapat makin menajam sehingga masing – masing pihak yang terlibat konflik akan mengalami frustrasi karena tidak dapat mencapai tujuan akibat terhalang oleh lawan konflik. Sikap negatif terhadap lawan konflik akan semakin besar. Masing – masing pihak merasa hanya dirinyalah yang paling benar. Dimana masing – masing

pihak akan memperkuat posisi kekuasaannya dengan mencari teman serta menafsirkan norma dan peraturan untuk memperkuat posisinya.

d. Fase Krisis

Jika fase eskalasi tidak menghasilkan solusi, maka konflik akan meningkat menjadi fase krisis. Fase krisis terjadi karena konflik menjadi sangat besar dan sering melibatkan pihak lain yang memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. Perilaku pihak yang terlibat akan konflik itu sendiri tidak dapat terkontrol dikarenakan masing – masing pihak menjadi emosional. Norma atau peraturan sudah tidak ada artinya lagi dikarenakan masing – masing pihak menafsirkan norma dan peraturan tersebut untuk memperkuat kedudukan masing – masing pihak. Dimana masing – masing pihak semakin brutal dan saling membenci satu sama lain.

e. Fase Resolusi Konflik

Di fase ini akan terjadi salah satu fenomena antara lain:

1. Di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah.
2. Terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui intervensi pihak ketiga.

f. Fase Pasca Konflik

Dalam fase ini bisa terjadi beberapa kemungkinan antara lain;

1. Hubungan antara masing – masing pihak yang terlibat konflik berangsur – angsur kembali normal. Jika hasil dari resolusi menghasilkan win dan win Solution sehingga kedua belah pihak merasa puas.

2. Hubungan diantara masing – masing pihak yang terlibat konflik akan tetap renggang. Dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas akan hasil yang telah diterima.

c. Motif Penyebab Konflik

Menurut William (dalam Idhamsyah, 2012:106) konflik sosial tidak terjadi begitu saja, karena ada faktor yang kompleks mulai dari kekuatan etnis, kelas sosial, ketidaksetaraan, kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, saling ketergantungan, dan intervensi internasional.

Menurut Surbakti (2007:151) pada dasarnya konflik dapat disebabkan oleh dua hal yaitu, konflik politik kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal:

1. Kemajemukan horizontal

Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal dapat menimbulkan konflik karena masing – masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman kultur lain.

2. Kemajemukan vertikal

Struktur masyarakat yang berdasarkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat tidak memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan tetapi memiliki kepentingan.

Penyebab konflik sangatlah kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois & Miley (dalam Ningrum 2016:8), sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan oleh dua orang/ kelompok atau lebih dalam situasi yang sama berbeda-beda.

Menurut Robbins (dalam Fitratullah 2014:39), konflik muncul karena adanya kondisi yang melatarbelakangi (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut juga menjadi sumber konflik, sumber terjadinya konflik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.

1. Komunikasi

Komunikasi yang buruk antar individu, dalam perbedaan persepsi atau pandangan terhadap sesuatu hal, ide, maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadikan kondisi terjadinya konflik.

2. Struktur

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang secara potensial dapat memunculkan konflik. Pada setiap departemen atau fungsi dalam organisasi mempunyai kepentingan, tujuan dan programnya sendiri-sendiri yang sering kali berbeda dengan yang lain.

3. Pribadi

Penyebab konflik yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap –tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan sehingga berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial.

Dari faktor penyebab konflik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi, struktur dan faktor pribadi merupakan hal- hal yang dapat menjadi penyebab konflik terjadi.

3. Implikasi Perubahan Sosial

a. Implikasi

Pengertian implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau terlibat. Sehingga setiap imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan sesuatu hal.

Samuel (dalam Mustikaningsih, 2016:29) menjelaskan implikasi adalah akibat secara langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah,

pengertian lain implikasi ialah kesimpulan atau hasil akhir temuan atas penelitian, tujuan implikasi penelitian adalah membandingkan dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilakukan melalui sebuah metode. Selanjutnya Menurut Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (dalam Mustikaningsih, 2016:29) “ Implikasi ialah sesuatu yang dapat dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan implikasi atau dampak adalah keterlibatan individu atau kelompok terhadap suatu masalah dan melibatkan banyak orang dan dapat menimbulkan dampak yang besar. Contohnya ketika akan diadakannya pemilu semua orang terlibat didalamnya dan jika ada masalah maka orang yang ikut terlibat akan mendapat dampaknya.

b. Perubahan Sosial

Menurut Harper (dalam Martono,2011:5) perubahan sosial merupakan pergantian atau (perubahan) yang sangat signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya menurut Soekanto (2009:258) Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya.

Perubahan- perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.

Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi: Soekanto (2009:262-263). Menurut Davis mengartikan “ perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadidalam struktur dan fungsi masyarakat” (Soekanto, 2009:262). Menurut MacIver mengatakan “ perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial” (Soekanto, 2009:263). Menurut Gillin dan Gillin mengatakan “perubahan - perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”(Soekanto, 2009:263). Menurut Soemardjan adalah “ segala perubahan- perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku dianatara kelompok-kelompok dalam masyarakat” (Soekanto, 2009:263).

c. Dampak Perubahan Sosial

Sedangkan menurut anggapan Gillin & Gillin (dalam soekanto, 2009: 265) perubahan sosial itu merupakan cara hidup yang sudah diterima, yang disebabkan oleh komposisi penduduk,kebudayaan material,

adanya perubahan kondisi geografis maupun karena adanya penemuan didalam masyarakat. Adapun yang mempengaruhi adanya perubahan sosial yakni lingkungan, perilaku, norma, teknologi serta keyakinan.

1. Lingkungan masyarakat

Adanya pengaruh lingkungan sekitar dapat membuat perubahan sosial di masyarakat. Dimana kehidupan manusia tidak akan terlepas dari interaksi antar manusia. Jadi suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan alam manusia akan mempengaruhi hubungan interaksi mereka dengan manusia lain.

2. Perilaku

perilaku dapat mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.

3. Norma

Adanya aturan – aturan atau hukum yang telah berlaku di masyarakat, akan tetapi norma/ aturan yang ada di masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Tidak ada persepsi atau persamaan pandangan diantara anggota masyarakat mengenai norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat

4. Teknologi

Adanya penemuan baru berupa teknologi, teknologi dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Salah satu

bentuk teknologi yang beberapa dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah teknologi informasi.

5. Keyakinan

Adanya perbedaan keyakinan (agama) dapat menimbulkan permasalahan atau konflik di masyarakat. dalam kehidupan individu ataupun kelompok. Kepercayaan (agama) ialah suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individu maupun kelompok. Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat manapun Gillin & Gillin (dalam Soekanto, 2009: 265).

G. Definisi Konseptual

Konsep dalam penelitian merupakan salah satu hal yang perlu ditegaskan guna menetapkan batasan - batasan penulisan, dari beberapa uraian latar belakang masalah dan kerangka berpikir penelitian ini menggunakan definisi konsep penelitian yakni antara lain :

1. Pembelahan Ideologi Politik adalah perpecahan pemikiran politik yang melibatkan tokoh- tokoh penting dan aturannya membuat masyarakat mengikuti yang telah di tetapkan.
2. Motif atau konflik adalah merupakan dorongan dari seseorang atau kelompok masyarakat untuk dapat mempengaruhi orang lain dan menganggap mereka menyimpang dan sama dengan konflik yaitu Dimana konflik terjadi karena adanya pertentangan atau dorongan antara dua belah pihak ataupun lebih dan memunculkan motif.

3. Implikasi adalah keterlibatan didalam suatu hal tertentu , dan memiliki dampak secara langsung terhadap suatu hal tertentu dan berhubungan dengan adanya perubahan sosial dan berdampak ke masyarakat.

H. Definisi Oprasional

Definisi oprasional dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi operasional sebagai rincian dan indikator pengukur suatu variabel, adapun beberapa variabel yang akan penulis sampaikan sebagai indikator sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel 1.2 Oprasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Motif penyebab konflik	Komunikasi	Adanya komunikasi yang buruk dari calon Gubernur DKI Jakarta.
	Struktur	Adanya kelompok – kelompok yang menimbulkan konflik dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
	Pribadi	Adanya konflik pribadi dan dapat mempengaruhi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta
Implikasi perubahan sosial	Lingkungan masyarakat	Adanya pengaruh dari kelompok para kandidat yang dapat mempengaruhi masyarakat. - Tim sukses Ahok - Tim sukses Anies
	Perilaku	- Adanya pengaruh perilaku kandidat (Ahok) terhadap masyarakat. - Adanya pengaruh perilaku kandidat Anies terhadap masyarakat.
	Norma	- Adanya undang – undang pemilihan calon gubernur DKI Jakarta. - Adanya fatwa MUI
	Teknologi	- Adanya pengaruh media sosial terhadap masyarakat DKI Jakarta
	Keyakinan	Stateman agama yang sangat kuat membuat masyarakat memilih pemimpin Muslim pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Kemudian akan di perkuat dengan wawancara Masyarakat Jakarta (Mahasiswa – mahasiswi) yang berasal dari Jakarta yang berada di Yogyakarta. Tujuan dari wawancara itu sendiri sebagai data pendukung agar memperkuat data primer dan data sekunder yang telah diperoleh oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2009: 29) penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan digunakan untuk meneliti kondisi atau subjek yang alamiah dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan kepada maknanya daripada general. Menurut Sugiyono (2014: 53) Deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang ada dengan menggunakan cara yaitu mendeskripsikannya atau menggambarkan data yang telah ada sebagaimana adanya tanpa merubah data asli.

Menurut Nasution (2009:27) "*case study*" atau studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci tentang suatu aspek lingkungan sosial dan juga manusia. Penelitian ini di batasi waktu dan mengumpulkan informasi secara lengkap menggunakan berbagai prosedur yang telah di tentukan. Penelitian ini menggunakan studi kasus karena peneliti akan melihat secara mendalam mengenai motif yang

melatar belakangi pembelahan ideologi dan implikasi sosial pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Penelitian ini bersifat *library Research (kepuustakaan)*. Menurut Nazir (2003:27) studi kepuustakaan adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan studi terdahulu yaitu seperti buku –buku, literatur, media Online, dan laporan – laporan yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepuustakaan ialah langkah yang baik Dimana seorang peneliti akan menetapkan topik penelitiannya. Dalam mencari teori, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi melalui kepuustakaan yang berhubungan.

b. Sumber Data

menurut Zuldafrial (2012:46) sumber data adalah subjek dari mana data yang telah di peroleh. Sumber data sendiri ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data bukan hanya dari tulisan maupun dari non tulisan. Dalam kepuustakaan atau *library research* sumber yang diperolehakan di kumpulkan dan akan di pilih – pilih, dan memilah data yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian akan di perkuat dengan wawancara masyarakat Jakarta(mahasiswa- mahasiswi) yang berasal dari Jakarta. adapun sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu dalam peroses wawancara. Data primer tersebut didapat dari unit analisa yang di ajukan peneliti.

Tabel 1.3 Tabel Data Primer

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Addin Khaerunnisa Juswil	Mahasiswa UMY (Jakarta Timur)	03 Januari 2019
2	M. Nizzar	Mahasiswa UMY (Jakarta Selatan)	03 Januari 2019
3	Feyzars Ma'ruf	Mahasiswa UNP (Jakarta Selatan)	03 Januari 2019
4	Maria Theresa	Mahasiswa UNRIO (Jakarta Timur)	06 Januari 2019
5	Hana Dwika	Mahasiswa UNRIO(Jakarta Timur)	06 Januari 2019
6	Indri Novitasari	Mahasiswa UMY (Jakarta Barat)	04 Januari 2019
7	Bella Anastasya P	Mahasiswa UPN (Jakarta Barat)	04 Januari 2019
8	M. Alfiansyah	Mahasiswa UMY (Jakarta Pusat)	04 Januari 2019

2. Sumber data sekunder diperoleh dari berita Online media terpercaya seperti detiknews.com, kompas.com, republik.co.id, tribunnews.com, merdeka.com , Tirto.com, BBC.com dan bps.go.id dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal – jurnal, buku –buku ilmiah yang sesuai dengan peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (library Research) atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan melalui literatur terdahulu dan buku- buku yang menyangkut dengan masalah yang akan diteliti. Secara teknis pengumpulan data diambil dari sumber – sumber yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data erat hubungannya dengan permasalahan peneliti yang

akan di pecahkan. Jadi, studi pustaka adalah studi yang berasal dari teks yang seluruhnya di olah secara filosofis dan teoritis Muhadjir (2000:158). Secara spesifik, penelitian ini akan fokus dan berkonsentrasi pada berita berkaitan dengan motif yang melatar belakangi terjadinya pembelahan ideologi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, serta dampaknya ke masyarakat

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah memfokuskan atau mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Surya (2010:59) metode deskriptif dalam penelitian ini yang sumber – sumbernya akan di kumpulkan dan akan disajikan secara lebih sistematis dan menjelaskan hubungan agar mudah dipahami. Data – data yang akan dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan angka – angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan dan data untuk dapat memberikan gambaran penyajian laporan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, menjelaskan secara singkat fenomena melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2010:208).

- a. Reduksi data: proses pemilihan data, penyederhanaan, pengabstrakan, dan memilih informasi data mentah ataupun data kasar yang ada di catatan – catatan.
- b. Penyajian data: penyajian data informasi dan menyusun informasi secara kompleks ke dalam sebuah bentuk yang sistematis, sehingga

dapat lebih selektif dan menyederhanakan serta memberikan adanya penarikan kesimpulan data.

- c. Kesimpulan: tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data – data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini terdiri dari empat bab utama yaitu:

Bab I

Akan di bahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, jenis penelitian, objek peneliti, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode pengumpulan data, teknik analisis, pengumpulan data dan sistematika pembahas.

Bab II

Deskripsi objek penelitian, gambaran umum pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Biografi masing – masing calon Gubernur dan visi misi masing – masing calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

Bab III

Membahas mengenai motif penyebab konflik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, dan membahas Implikasi perubahan sosial di masyarakat DKI Jakarta 2017.

Bab IV

Akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil analisa peneliti.